



**PENGADILAN NEGERI  
TEMBILAHAN**

# **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025**



**@pntembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pn-tembilahan.go.id**



## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NO. 2551/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI ANDA, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 1 Desember 2025

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

NIP. 19610402 198203 2003

FERI ANDA, S.H., M.H.

NIP. 19790212 200604 1002

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**NO. 2551/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2025**  
**Pengadilan Negeri Tembilahan**

| No.                                                                                                                                     | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Target |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b> |                                                                                |                                                                                                                                                          |        |
| 1.                                                                                                                                      | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 97     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 98     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 97     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 97     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 98     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 100    |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 100    |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | 4,3    |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.9 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                   | 83     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court                                                                                | 98     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)                                                                           | 98     |
|                                                                                                                                         |                                                                                | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)                                                                      | 98     |
| 2.                                                                                                                                      | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan                                                              | 3,8    |

**Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

|    |                                                                 |     |                                                                                          |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan            | 80 |
|    |                                                                 | 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA     | 98 |
|    |                                                                 | 3.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM | 98 |
|    |                                                                 | 3.4 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA                                              | 98 |
|    |                                                                 | 3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM                                          | 80 |
|    |                                                                 | 3.6 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           | 3  |

|    | Kegiatan                                                                  | Anggaran          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 5.652.469.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp. 47.112.000    |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp. 136.792.000   |

Tembilahan, 1 Desember 2025

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

NIP. 19610402 198203 2003

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan



FERI ANDA, S.H., M.H.

NIP. 19790212 200604 1002